

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Sampel Pemerintah Daerah yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 83 Pemerintah Daerah dengan total data 168 Pemerintah Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan pusat Statistika (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2011 sampai dengan 2015. Fokus penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, kompleksitas pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kelemahan pengendalian internal pada Pemerintah Daerah. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No	Kriteria	Jumlah
1	Total Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Indonesia periode 2011- 2015	168
2	Pemerintah Daerah yang memiliki nilai PDRB Negatif	(5)
3	Pemerintah Daerah yang tidak memiliki data PeGI	(58)
4	Data terkena outlier	(22)
5	Data tersedia lengkap	83
Total sampel selama lima tahun penelitian yang memenuhi kriteria <i>purposive sampling</i>		83

Sumber: Hasil Analisis Data, 2016

Berdasarkan tabel 4.1. terlihat bahwa selama periode 2011- 2015 jumlah pemerintah daerah yang memiliki nilai PDRB negatif sebanyak lima pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang tidak memiliki data PeGI sebanyak 58 pemerintah daerah serta sebanyak 22 pemerintah daerah terkena *outlier*. Pada akhirnya pemerintah daerah yang memenuhi kriteria *purposive sampling* sebanyak 83 sampel.

B. Uji Kualitas Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, kompleksitas pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengendalian internal di pemerintah daerah.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 83 data sampel yang berasal dari jumlah pemerintah daerah yang memiliki data lengkap untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya akan ditinjau secara deskriptif mengenai kondisi masing- masing variabel penelitian. Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata- rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Adapun nilai statistik deskriptif variabel penelitian disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPI	83	20	372	139,40	77,159
TA	83	962.165.3 53.684,31	425.353.600 .919.700,94	33.394.133. 283.316,43	94.655.187.9 34.706,11
PDRB	83	0,00	0,21	0,0623	0,02508
JKec	83	44	664	200,20	175,443
IPM	83	55,55	78,99	67,5747	4,91630
PeGI	83	1,2	3,39	2,2837	0,56013

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif masing- masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah data setiap variabel adalah sebanyak 83 pemerintah daerah. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal dengan melihat jumlah temuan kasus kelemahan pengendalian internal yang terjadi di pemerintah daerah, menunjukkan nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 372 dengan rata- rata sebesar 139,40 dan standar deviasi sebesar 77,159. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap ukuran pemerintah daerah dengan melihat total aset yang dimiliki setiap pemerintah daerah, menunjukkan nilai minimum sebesar 962.165.353.684,31, nilai maksimum sebesar 425.353.600.919.700,94 dengan rata- rata sebesar 33.394.133.283.316,43 dan standar deviasi sebesar 94.655.187.934.706,1.

Hasil statistik deskriptif untuk analisis variabel pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan laju PDRB memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,21 dengan rata- rata sebesar 0,062 dan standar deviasi

sebesar 0,02508. Kemudian hasil analisis statistik deskriptif terhadap kompleksitas pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan jumlah kecamatan memiliki nilai minimum sebesar 44, nilai maksimum sebesar 664 memiliki rata-rata 200,20 dan standar deviasi 175,44.

Analisis statistik deskriptif variabel kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai minimum sebesar 55,55, nilai maksimum sebesar 78,99 dengan rata-rata 67,60 dan standar deviasi sebesar 4,92. Terakhir, hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diukur dengan PeGI memiliki nilai minimum sebesar 1,20, nilai maksimum sebesar 3,39 dengan rata-rata sebesar 2,28 dan standar deviasi sebesar 0,56.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

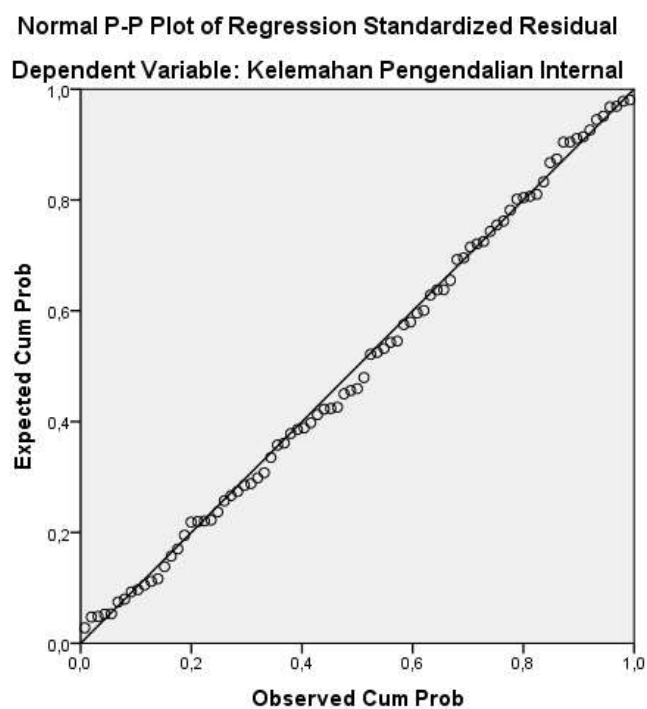
Tahapan pengujian regresi berganda yaitu menggunakan beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas yang secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil Uji Normalitas

Hipotesis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda (*multiple regression*). Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik atau belum. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati

normal. Pengambilan keputusan uji normalitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan grafik P-P Plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Selengkapnya mengenai hasil uji normalitas penelitian dapat dilihat dari gambar 4.1 sebagai berikut.



Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Gambar 1.1 Hasil Uji Normalitas

Grafik P-P Plot diatas menggambarkan bahwa grafik normal probability garis observasi mendekati atau menyentuh garis diagonalnya yang berarti nilai residual berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas juga bisa dilihat dengan menggunakan uji *Kolmogorov- Smirnov* untuk lebih meyakinkan bahwa data telah terdistribusi secara normal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	27,99848887
Most Extreme Differences	Absolute	,048
	Positive	,048
	Negative	-,044
Test Statistic		,048
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai K-S sebesar 0,200 dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik.

b. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Uji autokorelasi yaitu untuk mengetahui korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hal yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode untuk

menguji asumsi klasik yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW).

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan uji statistik Durbin Watson:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,802 ^a

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.4 diatas terlihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) adalah 1,802 dengan jumlah unit analisis (n) adalah 83 dan jumlah variabel bebas (k) adalah 5 sehingga nilai dU adalah 1,7728 dan nilai dL adalah 1,5183. Oleh karena itu, $1,7728 < 1,802 < 2,4817$ atau $dU < dW < (4-dL)$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Berarti model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak ada gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
TA	0,672	1,489	Bebas Multikolinearitas
PDRB	0,944	1,059	Bebas Multikolinearitas
JKec	0,753	1,319	Bebas Multikolinearitas
IPM	0,526	1,901	Bebas Multikolinearitas
PeGI	0,631	1,585	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance $> 0,10$. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel yang diteliti.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang berjenis homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Glejser

Variabel	t	Sig	Keputusan
Total Aset	-1,829	0,071	Homokedastisitas
PDRB	-1,105	0,272	Homokedastisitas
Jumlah Kecamatan	0,756	0,452	Homokedastisitas
IPM	1,895	0,062	Homokedastisitas
PeGI	-1,226	0,224	Homokedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Data dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila memiliki nilai sig $> 0,05$. Hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa

nilai sig > 0,05. Kesimpulannya data dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini meliputi hasil uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan analisis regresi berganda.

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada model regresi berganda penggunaan *adjusted R²* (Adj R²) atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan akan lebih baik dalam melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen bila dibandingkan dengan R^2 .

Berikut dapat diketahui hasil uji Adj R² penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Adjusted R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.932 ^a	.868	.860	28,893

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,860. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 86,0% variasi variabel dependen (Kelemahan Pengendalian Internal) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (Total Aset, PDRB, Jumlah Kecamatan, IPM dan PeGI) dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa

kemampuan variabel independen (Total Aset, PDRB, Jumlah Kecamatan, IPM dan PeGI) cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen (Kelemahan Pengendalian Internal).

Sedangkan sisanya sebesar 14,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian, seperti jumlah penduduk, jumlah SKPD, umur pemerintah daerah, jumlah PAD dan jumlah Belanja Modal yang mungkin dapat memengaruhi kelemahan pengendalian internal di pemerintah daerah.

2. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan (uji statistik F) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Sttistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	423906,818	5	84781,364	101,557	,000 ^b
	Residual	64281,061	77	834,819		
	Total	488187,880	82			

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Hasil pengujian simultan (uji statistik F) menunjukkan nilai F-hitung 101,557 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha = 0,05$) yang artinya hipotesis diterima. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, kompleksitas pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan

pemanfaatan teknologi informasi secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

3. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual (parsial) yaitu ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju PDRB, kompleksitas pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah kecamatan, kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM dan pemanfaatan teknologi informasi yang diukur dengan PeGI dalam menerangkan variabel dependen yaitu kelemahan pengendalian internal.

Signifikansi model regresi pada penelitian ini dapat diketahui dengan melihat nilai sig. yang ada pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-173,779	58,601		-2,965	,004
	Total Aset	-1,357E-13	,000	-,167	-3,300	,001
	Produk Domestik Regional Bruto	60,444	130,893	,020	,462	,646
	Jumlah Kecamatan	,429	,021	,976	20,550	,000
	Indeks Pembangunan Manusia	3,872	,895	,247	4,326	,000
	Pemeringkatan e Government Indonesia	-14,719	7,172	-,107	-2,052	,044

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22, 2016

Hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik t) yang terlihat dari tabel 4.8 dapat diinterpretasikan bahwa hasil uji t untuk H_1 diperoleh nilai t hitung -2,965 dengan nilai signifikansi dibawah 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,001 dan memiliki arah koefisien negatif sebesar -1,357. Artinya, jika terjadi kenaikan total aset sebesar Rp 1, akan berdampak pada penurunan kelemahan pengendalian internal sebanyak 1,357 kasus. Hasilnya **H_1 ditolak** karena hasil uji t menunjukkan arah negatif.

Hasil Uji t untuk H_2 diperoleh nilai t hitung 0,462 dengan nilai signifikansi diatas 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,646 dan memiliki arah koefisien positif sebesar 60,444. Artinya, jika terjadi kenaikan laju PDRB sebesar 1 %, akan berdampak pada peningkatan kelemahan pengendalian internal sebanyak 60,444 kasus. Kesimpulannya **H_2 ditolak** karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hasil Uji t untuk H_3 diperoleh nilai t hitung sebesar 20,550 dan nilai signifikansi dibawah 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,000 serta memiliki arah koefisien positif sebesar 0,429. Artinya, jika terjadi kenaikan jumlah kecamatan sebanyak 1, akan berdampak pada peningkatan kelemahan pengendalian internal sebanyak 0,429 kasus. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah **H_3 diterima** karena hasil pengujian menunjukkan arah positif dan signifikan.

Hasil Uji t untuk H_4 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,326 dengan nilai signifikansi dibawah 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,000 dan memiliki arah positif sebesar 3,872. Artinya, jika terjadi kenaikan IPM sebesar 1, akan

berdampak pada peningkatan kelemahan pengendalian internal sebanyak 3,872 kasus. Artinya **H₄ ditolak** karena hasil pengujian menunjukkan arah positif.

Hasil Uji t untuk H₅ diperoleh nilai t hitung -2,052 dengan nilai signifikansi dibawah 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,044 dan memiliki arah negatif sebesar -14,719. Artinya, jika terjadi kenaikan PeGI sebesar 1, akan berdampak pada penurunan kelemahan pengendalian internal sebanyak 14,719 kasus. Kesimpulan untuk **H₅ diterima** karena hasil pengujian negatif signifikan.

4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil analisis data pada tabel 4.8 diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut.

$$KPI = -173,779 - 1,357TA + 0,429JKEC + 3,872IPM - 14,719PeGI + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda tersebut, nilai konstan untuk persamaan regresi menunjukkan sebesar -173,779. Artinya, ketika total aset, indeks pembangunan manusia dan pemeringkatan *e-government* dianggap konstan, maka jumlah pengendalian internal akan menurun sebesar 173.779 kasus.

D. Pembahasan

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap

kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Kesimpulannya jika terjadi peningkatan ukuran pemerintah daerah maka akan menurunkan jumlah kasus kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kristanto (2009) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Tetapi, sejalan dengan penelitian Putri dan Mahmud (2015). Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka kelemahan pengendalian internal akan semakin kecil.

Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tersebut akan meningkatkan pengawasan terhadap aset yang dimiliki. Pemerintah akan berupaya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk melindungi asetnya sehingga mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Pemerintah akan melindungi asetnya misalnya saja dengan memberikan pelatihan kepada setiap pegawai agar dapat mengimplementasikan pengendalian internal yang baik dan benar.

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian

internal pemerintah daerah. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hartono, Mahmud dan Utaminingsih (2014). Tetapi sejalan dengan penelitian Putri dan Mahmud (2015). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pengendalian internalnya juga lebih baik atau lebih buruk dari pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah tidak dapat dijadikan indikator penyebab dari kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

3. Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel kompleksitas pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Kesimpulannya semakin kompleks pemerintah daerah maka akan semakin banyak ditemukan jumlah kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurwati dan Trisnawati (2015). Artinya, pemerintah daerah yang memiliki jumlah kecamatan yang banyak pada suatu daerah, maka daerah tersebut akan kesulitan dalam mengimplementasikan pengendalian internalnya. Ketika kompleksitas pemerintah daerah tinggi maka pengawasan serta

pengendalian internal yang harus dilakukan juga lebih rumit. Hal ini terjadi karena ruang lingkup pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian akan menjadi lebih luas.

4. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Kesimpulannya semakin baik kualitas sumber daya manusia maka akan semakin banyak ditemukan kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nafidah (2011). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas yang dimiliki oleh seseorang maka ada kecenderungan orang tersebut untuk menyalahgunakan kelebihannya untuk melakukan kecurangan. Kecurangan ini dapat berupa suatu tindakan yang menyimpang dari kewajiban yang semestinya dipenuhi. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang ada di pemerintah cenderung tidak sehat. Hal demikian yang menimbulkan adanya temuan kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak di pemerintah daerah.

Hal tersebut terjadi karena indikator IPM yang digunakan untuk mengukur pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kelemahan pengendalian internal tidak melibatkan aspek moral. Indikator yang

digunakan untuk mengukur IPM hanya meliputi dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Alasan tersebut sejalan dengan Subri (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia terlihat dari peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan dengan peningkatan kemampuan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif serta membina lingkungan hidup, lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi.

5. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.

Kesimpulan dari pengujian hipotesis 5 ini adalah semakin banyak pemerintah daerah menggunakan teknologi informai maka kelemahan pengendalian internal yang ditemukan akan semakin sedikit. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yamin dan Sutaryo (2015) akan tetapi sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan bijaksana. Pemanfaatan teknologi ini memudahkan dalam mengorganisir sekaligus meminimalisir maladministrasi yang sering terjadi dalam suatu organisasi. Pemerintah

lebih mudah melakukan pengawasan dan mengorganisir instansi- instansi pemerintah yang saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, temuan kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah bisa dikurangi.